



RENCANA KERJA RENJA



TAHUN
2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KATA PENGANTAR

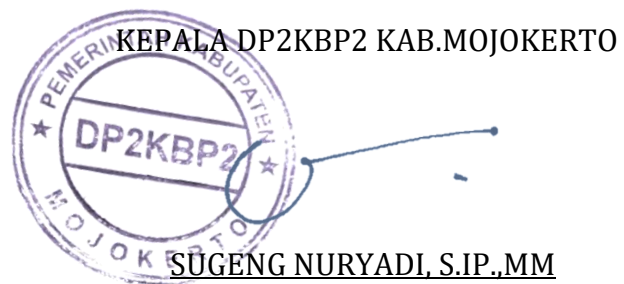
Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan RENJA ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan arah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rancangan RENJA ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi lembaga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna RENJA ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan RENJA di tahun-tahun mendatang

Mojokerto, Maret 2024



SUGENG NURYADI, S.IP.,MM
Pembina
NIP. 19681010 198903 1 008

DAFTAR ISI

Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan	5	
1.4 Sistematika Penulisan.	6	
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	10	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2023	31	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	41	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44	
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan.	54	
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025.	57	
3.3 Program dan Kegiatan	58	
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.	88
BAB V	PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah – **hal 11**
- Tabel : Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran – **hal 35**
- Tabel 2.2 : Pencapaian kinerja Pelayanan DP2KBP2 – **hal. 50**
- Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025 – **hal 55**
- Tabel 2.4 : usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun Anggaran 2025 – **hal 54**
- Tabel TC-33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2025 - **hal 64**
- Tabel 4.1 : Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggran 2025 – **hal 94**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Program Pemberdayaan Perempuan dengan upaya-upaya peningkatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dan anak melalui penguatan kelembagaan gender dan anak, meningkatkan kampanye anti trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi

anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan , eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sementara Program Keluarga Berencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia kawin, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga merupakan strategi dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dengan berorientasi pada kesehatan reproduksi dan penghormatan hak-hak reproduksi seseorang sebagai bagian integral pembangunan nasional.

Untuk itu baik Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaan pada tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Didalamnya memuat kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi PPRG dan fokus pengawasan urusan pemerintahan Bidang PP dan PA.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan APBD 2020. Didalamnya mencantumkan kewajiban bagi OPD untuk menyusun analisis gender dan menuangkan dalam GBS serta dilampirkan dalam RKA;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah No.9 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
33. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
34. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
36. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

37. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);
38. SK Tim penyusunan renja DP2KBP2 tahun 2025 belum ada; Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/658/416-108/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dimaksudkan agar :

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan kegiatan strategis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun satu tahun.
- b. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder), monitoring, analisis data, evaluasi/pemantapan program baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi ke semua pihak yang berkepentingan untuk memiliki pandangan yang sama secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam upaya mencapai prioritas peningkatan kualitas SDM.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah untuk :

- a. Menjabarkan arahan Review Renstra Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 kedalam operasionalisasi program.
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif.

- c. Menyediakan dokumen rencana kerja perangkat daerah sebagai acuan operasional program.
- d. Menentukan strategi untuk peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber dana organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturandaerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Renja tahun 2024, rencana dan hubungannya dengan dokumen Renstra dan RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

1.4. Sistemmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun dari hasil pengumpulan informasi SKPD

Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rentra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2026.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah

pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto per tanggal 30 Desember 2023 sebesar **95,93 %** sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 20.282.709.400,00
Anggaran setelah Perubahan	Rp. <u>20.975.893.333,00</u>
Realisasi	Rp. 19.949.298.363,00
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. <u>1.026.594.970,00</u>

Sedangkan anggaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebesar Rp 20.975.893.363,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)	Permasalahan							
							I		II		III		IV												
							8	9	10	11	12	13	14	15											
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)(Nilai)			APE																			

2	[PROGRAM] 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender(%)			310,000, 000.00	570,905,8 65.00	82,14		0	22,899,1 00.00	0.00	20,325,7 00.00	0.00	13,407,7 00.00	73. 68	59,926,0 00.00	73.68	116,558, 500.00				
3	[KEGIATAN] 2.08.02.2.01 Pelebagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah OPD yang Melaksanakan Anggaran Responsif Gender(OPD)				67,891,85 0.00	58.00	35,000,0 00.00	0.00	1,479,00 0.00	0.00	575,000. 00	58.00	8,607,70 0.00	0.0 0	22,964,2 00.00	58.00	33,625,9 00.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.01.0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota(D okumen)	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota(D okumen)					57.00	10,000,0 00.00	0.00	739,500. 00	0.00	0.00	57.00	8,607,70 0.00	0.0 0	0.00	100.00	9,347,20 0.00				

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan(Lembaga)					57.00	24,813,125.00	57.00	20,046,100.00	0.00	3,780,500.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	100.00	24,426,600.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas(Orang)					120.00	50,000,000.00	0.00	634,500.00	0.00	7,375,000.00	40.00	4,200,000.00	80.00	36,961,800.00	100.00	49,171,300.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia(Dokumen)					1.00	10,000,000.00	0.00	739,500.00	1.00	8,595,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,334,700.00				

2	[PROGRAM] 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan(%)		395,499, 000.00	371,211,4 00.00	100,00		0	7,670,70 0.00	0.00	58,884,4 00.00	0.00	50,590,5 00.00	10 0	6391290 0	100.00	181,058, 500.00				
3	[KEGIATAN] 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Lintas Sektor yang Berperan Aktif dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan/TPPO(Orang)			116,445,5 00.00	65.00	50,000,0 00.00	0.00	401890 0	0.00	2000000 0	50.00	9200000	15. 00	1600000 0	65.00	49,218,9 00.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.01.0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota(D okumen)				1.00	50,000,0 00.00	0.23	4,018,90 0.00	0.30	20,000,0 00.00	0.25	9,200,00 0.00	0.2 2	16,000,0 00.00	100.00	49,218,9 00.00				

3	[KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Mitra Kerja/Jejaring yang dapat Bersinergi dengan P2TP2A(Mitra Kerja/Jejaring)				234,945,5 00.00	14.00	124,243, 450.00	0.00	365180 0	0.00	2938650 0	10.00	4101550 0	4.0 0	4791290 0	14.00	121,966, 700.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.02.0 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan(Orang)					54.00	99,673,7 50.00	0.00	1,804,60 0.00	25.0 0	18,361,5 00.00	0.00	37,482,5 00.00	29. 00	41,483,9 00.00	100.00	99,132,5 00.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.02.0 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(L ayanan)					3.00	24,569,7 00.00	1.00	1,847,20 0.00	1.00	11,025,0 00.00	0.00	3,533,00 0.00	1.0 0	6,429,00 0.00	100.00	22,834,2 00.00					

3		[KEGIATAN] 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Rumah Aman dan Jumlah Petugas yang Tercukupi dan Cakap dalam Pendampingan(Orang)				19,820,40 0.00	43.00	10,000,0 00.00	0.00	0	0.00	9,497,90 0.00	43.00	375,000. 00	0.0 0	0	43.00	9,872,90 0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.03.0 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas(Orang)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas(Orang)					36.00	10,000,0 00.00	36.0 0	0.00	0.00	9,497,90 0.00	0.00	375,000. 00	0.0 0	0.00	100.00	9,872,90 0.00					
2		[PROGRAM] 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa(%)		100,000, 000.00		11,314,25 0.00	49,34		0	739,500. 00	0.00	0.00	0.00	925,000. 00	10 0	0	100.00	1,664,50 0.00					

3		[KEGIATAN] 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Kebijakan Pelaksanaan PUG Tingkat Desa(Orang)				11,314,25 0.00	72.00	1,792,50 0.00	0.00	739,500. 00	0.00	0	72.00	925,000. 00	0.0 0	0	72.00	1,664,50 0.00						
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.04.2.01.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(P erangkat Daerah)					57.00	1,792,50 0.00	0.00	739,500. 00	0.00	0.00	57.00	925,000. 00	0.0 0	0.00	100.00	1,664,50 0.00						
1	Mening katnya Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak serta Keluarg a Berenca na		Kabupaten Layak Anak (KLA)(Nilai)					KLA																	

2	[PROGRAM] 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak(%)	100,000, 000.00	48,776,40 0.00	93,75	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,00 0.00	10 0	2228940 0	100.00	24,489,4 00.00						
3	[KEGIATAN] 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun(Buku)		48,776,40 0.00	1.00	25,000,0 00.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2200000	1.0 0	2228940 0	1.00	24,489,4 00.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.05.2.01.0 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia(Dokumen)			1.00	25,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2,200,00 0.00	0.7 5	22,289,4 00.00	100.00	24,489,4 00.00					
2	[PROGRAM] 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak(%)	368,267, 400.00	153,023,2 00.00	38,89	0	7,755,00 0.00	0.00	26,898,9 00.00	0.00	25,818,0 00.00	10 0	1622620 0	100.00	76,698,1 00.00						

3	[KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan dan Desa yang Memahami PHA(Orang)				117,795,000.00	40.00	59,760,000.00	0.00	7755000	0.00	26898900	40.00	23918000	0.00	0	40.00	58,571,900.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha(Organisasi)					27.00	9,880,000.00	27.00	0.00	0.00	4,759,000.00	0.00	4,999,000.00	0.00	0.00	100.00	9,758,000.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	49,880,000.00	0.00	7,755,000.00	0.00	22,139,900.00	1.00	18,919,000.00	0.00	0.00	100.00	48,813,900.00					

3		[KEGIATAN] 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Jejaring yang Bersinergi dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Mojokerto(Orang)				35,228,20 0.00	175.00	19,777,0 00.00	0.00	0	0.00	0	175.00	1900000	0.0 0	1622620 0	175.00	18,126,2 00.00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(O rang)					95.00	9,868,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.0 0	8,260,00 0.00	100.00	8,260,00 0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0 3 Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(D okumen)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(D okumen)					1.00	9,909,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,900,00 0.00	0.0 0	7,966,20 0.00	100.00	9,866,20 0.00					

			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak(%)				10,56		0		0.00		0.00		100								
3		[KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan dan Desa yang Memahami PHA(Orang)				117,795,000.00	40.00	59,760,000.00	0.00	7755000	0.00	26898900	40.00	23918000	0.00	0	40.00	58,571,900.00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha(Organisasi)				27.00	9,880,000.00	27.00	0.00	0.00	4,759,000.00	0.00	4,999,000.00	0.00	0.00	100.00	9,758,000.00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)				1.00	49,880,000.00	0.00	7,755,000.00	0.00	22,139,900.00	1.00	18,919,000.00	0.00	0.00	100.00	48,813,900.00					

3	[KEGIATAN] 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring yang Bersinergi dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Mojokerto(Orang)				35,228,20 0.00	175.00	19,777,0 00.00	0.00	0	0.00	0	175.00	1900000	0.0 0	1622620 0	175.00	18,126,2 00.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					95.00	9,868,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.0 0	8,260,00 0.00	100.00	8,260,00 0.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	9,909,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,900,00 0.00	0.0 0	7,966,20 0.00	100.00	9,866,20 0.00					

2	[PROGRAM] 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan(%)		590,489, 000.00	342,731,9 00.00	41,82	0	14,400,0 00.00	0.00	42,537,0 00.00	0.00	62,697,8 00.00	10 0	1875000 0	100.00	138,384, 800.00					
3	[KEGIATAN] 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Lintas Sektor dan Remaja yang Berperan Aktif dalam Pencegahan terhadap Anak/TPPO(Orang)			36,917,00 0.00	60.00	9,861,00 0.00	0.00	0	0.00	7803000	20.00	1675000	40. 00	0	60.00	9,478,00 0.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.01.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(P erangkat Daerah)				15.00	9,861,00 0.00	0.00	0.00	0.00	7,803,00 0.00	15.00	1,675,00 0.00	0.0 0	0.00	100.00	9,478,00 0.00				
3	[KEGIATAN] 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Jumlah Jejaring dan Petugas yang Bersinergi dengan P2TP2A dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Pelayanan(Orang)			288,199,9 00.00	125.00	120,615, 000.00	0.00	144000 00	0.00	2605900 0	100.00	6102280 0	25. 00	1875000 0	125.00	120,231, 800.00				

3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak(Orang)				17,615,00 0.00	108.00	9,735,00 0.00	0.00	0	0.00	8675000	108.00	0	0.0 0	0	108.00	8,675,00 0.00						
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.03.0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota(Lapran)					18.00	9,735,00 0.00	0.00	0.00	18.0 0	8,675,00 0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	100.00	8,675,00 0.00						
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prevalensi KB Aktif(%)					80,57																	

2	[PROGRAM] 2.14.02 PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan(%)				1,821,606 ,000.00	100,00		0	27,600,7 00.00	0.00	419,023, 600.00	0.00	542,498, 000.00	10 0	4561787 00	100.00	1,445,30 1,000.00				
3	[KEGIATAN] 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana(Orang)				167,124,7 00.00	100.00	4,420,00 0.00	0.00	0	0.00	4420000	100.00	0	0.0 0	0	100.00	4,420,00 0.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.1 5 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Lapor an)					1.00	4,420,00 0.00	0.00	0.00	1.00	4,420,00 0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	100.00	4,420,00 0.00				
3	[KEGIATAN] 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan(Jiwa)				1,654,481 ,300.00	1,169, 760.00	1,443,76 9,850.00	0.00	276007 00	0.00	4146036 00	1,169, 760.00	5424980 00	0.0 0	4561787 00	1,169, 760.00	1,440,88 1,000.00				

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0 8 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk(Unit)					38.00	24,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	5,606,900.00	0.00	18,667,800.00	100.00	24,274,700.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga(Laporan)					1.00	64,200,000.00	0.12	8,220,000.00	0.00	12,140,000.00	0.66	21,848,100.00	0.22	20,988,100.00	100.00	63,196,200.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.1 2 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pendataan yang Memahami Teknis Pendataan(orang)					80.00	232,800,000.00	0.00	0.00	20.00	12,600,000.00	40.00	103,800,000.00	20.00	116,400,000.00	100.00	232,800,000.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.1 3 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB(Dokumen)					2.00	1,097,569,850.00	0.00	0.00	0.00	389,863,600.00	1.00	411,243,000.00	1.00	295,702,800.00	100.00	1,096,809,400.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.1 4 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan(Laporan)					1.00	24,446,000.00	1.00	19,380,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,000.00	100.00	23,800,700.00						

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0 4 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang(Dokumen)				2.00	175,000,000.00	2.00	28,199,900.00	0.00	65,475,200.00	0.00	42,265,300.00	0.00	36,442,400.00	100.00	172,382,800.00						
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0 6 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)(Laporan)				2.00	234,000,000.00	0.00	0.00	1.00	56,484,000.00	1.00	56,484,000.00	0.00	120,798,000.00	100.00	233,766,000.00						
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0 7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Laporan)				1.00	477,900,000.00	0.00	0.00	0.50	141,540,400.00	0.25	111,863,200.00	0.25	223,999,550.00	100.00	477,403,150.00						

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK(Laporan)					1.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.50	38,945,994.00	0.00	0.00	0.50	40,848,000.00	100.00	79,793,994.00						
3	[KEGIATAN] 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program Bangga Kencana(Orang)				4,930,423,492.00	60.00	2,131,238,200.00	0.00	313114600	0.00	297759100	30.00	731641250	30.00	784988392	60.00	2,127,503,342.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB(Organisasi)					1.00	1,393,000,000.00	0.25	299,332,800.00	0.25	61,010,000.00	0.25	474,400,000.00	0.25	558,209,392.00	100.00	1,392,952,192.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia(Unit)					3.00	99,764,200.00	0.00	0.00	0.00	42,977,000.00	2.00	10,670,000.00	1.00	44,379,000.00	100.00	98,026,000.00						

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0 3 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)(Laporan)				1.00	30,474,000.00	1.00	13,781,800.00	0.00	11,372,100.00	0.00	3,371,250.00	0.00	0.00	100.00	28,525,150.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)(Orang)				1,828.00	608,000,000.00	0.00	0.00	1,828.00	182,400,000.00	0.00	243,200,000.00	0.00	182,400,000.00	100.00	608,000,000.00						
3	[KEGIATAN] 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi yang Terdistribusikan serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang Terlayani sesuai SOP(Alkon)				4,926,205,400.00	26,929.00	3,058,327,000.00	0.00	282,681.00	0.00	446,283,500.00	26,929.00	119,178,700.00	0.00	119,298,180.00	26,929.00	2,859,320,400.00					

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0 1 Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya(Lapora n)					2.00	66,400,0 00.00	1.00	1,067,00 0.00	0.00	8,585,00 0.00	0.50	7,710,00 0.00	0.5 0	17,290,8 00.00	100.00	34,652,8 00.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0 3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(Orang)					2,229. 00	1,532,09 8,000.00	1,99 5.00	22,751,1 00.00	234. 00	428,098, 500.00	0.00	637,830, 000.00	0.0 0	375,045, 000.00	100.00	1,463,72 4,600.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0 6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB(Unit)					6.00	1,436,12 9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	536,697, 000.00	0.0 0	800,646, 000.00	100.00	1,337,34 3,000.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0 8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya(Lapora n)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya(Lapora n)					1.00	23,700,0 00.00	0.25	4,450,00 0.00	0.25	9,600,00 0.00	0.50	9,550,00 0.00	0.0 0	0.00	100.00	23,600,0 00.00						

		Jaringan dan Jejarinya																						
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program Bangsa Kencana (PPKBD dan Sub PPKBD)				1,303,928,000.00	1,828.00	623,000,000.00	0.00	150871600	0.00	241856600	1,829.00	64700000	0.00	164738300	1,829.00	622,166,500.00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0 2 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)				1.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1.00	8,989,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,989,600.00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0 3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Kampung)				38.00	614,000,000.00	0.00	150,871,600.00	18.00	232,867,000.00	18.00	64,700,000.00	2.00	164,738,300.00	100.00	613,176,900.00						

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk(Kelompok)					3.00	19,921,000.00	3.00	14,185,800.00	0.00	5,632,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	19,818,500.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(Unit)					2.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	352,470,000.00	0.00	0.00	100.00	352,470,000.00						

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 3 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(Laporan)					1.00	9,921,000.00	0.00	0.00	1.00	9,756,700.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	100.00	9,822,700.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(Orang)					20.00	106,521,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	90,636,800.00	0.00	14,720,500.00	100.00	105,357,300.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 5 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(Orang)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(Orang)					2,586.00	5,430,600,000.00	2,586.00	543,060,000.00	0.00	543,060,000.00	0.00	2,172,240,000.00	0.00	2,172,240,000.00	100.00	5,430,600,000.00						

		PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS)																				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 9 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)(Dokumen)				18.00	10,079,000.00	0.00	0.00	0.00	243,800.00	18.00	9,641,700.00	0.00	30,000.00	100.00	9,915,500.00				
3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(Orang)				326,260,500.00	50.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00				
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntable, Bersih dan		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)				52.00															

	Transpa ran																							
2	[PROGRAM] 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)				10,680,21 5,031.00	84,28 (A)		0	590,298, 720.00	0.00	1,967,93 6,878.00	0.00	1,193,13 4,380.00	84. 42	1594950 299	84.42	5,346,32 0,277.00						
3	[KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perencanaan Daerah yang Tercapai Sesuai Target(%)				25,079,80 0.00	90.00	12,700,0 00.00	0.00	239980 0	0.00	0	90.00	6574800	0.0 0	3000200	90.00	11,974,8 00.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	7,500,00 0.00	1.00	1,499,80 0.00	0.00	0.00	1.00	4,875,00 0.00	0.0 0	900,000. 00	100.00	7,274,80 0.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					8.00	5,200,00 0.00	4.00	900,000. 00	0.00	0.00	4.00	1,699,80 0.00	0.0 0	2,100,20 0.00	100.00	4,700,00 0.00						
3	[KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)				9,497,154 ,487.00	86.00	5,316,34 4,000.00	0.00	543863 892	0.00	1864192 695	86.00	1110563 878	0.0 0	1216088 203	86.00	4,734,70 8,668.00						
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	5,316,34 4,000.00	36.0 0	543,863, 892.00	0.00	1,864,19 2,695.00	0.00	1,110,56 3,878.00	0.0 0	1,216,08 8,203.00	100.00	4,734,70 8,668.00						

3	[KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)				334,098,3 47.00	90.00	142,221, 375.00	0.00	186,969 80	0.00	308,590 50	75.00	322,720 0	15. 00	57,507,25 2	90.00	139,335, 282.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					14.00	12,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	8,290,00 0.00	1.0 0	2,388,00 0.00	100.00	10,678,0 00.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					168.00	12,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	2,976,00 0.00	126.00	6,386,00 0.00	42. 00	2,604,00 0.00	100.00	11,966,0 00.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	6,025,00 0.00	1.00	670,000. 00	0.00	2,444,80 0.00	2.00	0.00	1.0 0	2,732,60 0.00	100.00	5,847,40 0.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan(Dokum en)					6.00	9,000,00 0.00	6.00	650,000. 00	0.00	3,350,00 0.00	0.00	1,340,00 0.00	0.0 0	2,680,00 0.00	100.00	8,020,00 0.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 7 Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	33,721,3 75.00	1.00	0.00	0.00	17,333,2 50.00	2.00	0.00	1.0 0	16,239,6 50.00	100.00	33,572,9 00.00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 8 Fasilitas Kunjungan Tamuh(Laporan) Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamuh(Laporan)					12.00	7,000,00 0.00	3.00	0.00	0.00	720,000. 00	6.00	3,266,00 0.00	3.0 0	2,974,50 0.00	100.00	6,960,50 0.00				

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					119.00	62,475,000.00	27.00	17,376,980.00	0.00	4,035,000.00	60.00	12,990,000.00	32.00	27,888,502.00	100.00	62,290,482.00					
3	[KEGIATAN] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)				237,662,602.00	90.00	127,199,882.00	0.00	14538048	0.00	39982133	60.00	18527582	30.00	35715444	90.00	108,763,207.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12.00	62,577,482.00	3.00	10,229,888.00	3.00	18,441,333.00	3.00	9,911,262.00	3.00	18,482,804.00	100.00	57,065,287.00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	64,622,400.00	3.00	4,308,160.00	3.00	21,540,800.00	3.00	8,616,320.00	3.00	17,232,640.00	100.00	51,697,920.00					
3	[KEGIATAN] 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)				540,004,795.00	90.00	362,133,951.00	0.00	10800000	0.00	32903000	60.00	25196120	30.00	282639200	90.00	351,538,320.00					

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				182.00	105,000,000.00	0.00	6,850,000.00	91.00	31,343,000.00	22.00	18,386,900.00	69.00	41,627,500.00	100.00	98,207,400.00						
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Gedung)				3.00	237,133,951.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	4,084,220.00	3.00	230,621,700.00	100.00	234,885,920.00						
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				21.00	20,000,000.00	4.00	3,950,000.00	0.00	1,380,000.00	12.00	2,725,000.00	5.00	10,390,000.00	100.00	18,445,000.00						
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																100.00 %							
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																							

Tabel 2.1

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 %	83,28 %	83,28 (A)	83,19 (A)	83,19 (A)	83,78 (A)	-	-
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	90 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	6 Dok	300 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	2 Lap	6 Lap	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86 %	85 %	85 %	85 %	100 %	85 %	255 %	264 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100 %	36 Orang/bulan	108 Orang/bulan	300 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	86,15 %	86,15	86,15 %	86,15 %	100 %	86,15 %	258,45%	300 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai DP2KBP2 yang mendapatkan pakaian dinas	-	-	-	-	-	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	100 %	14 Paket	42 Paket	300 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	168 Paket	168 Paket	168 Paket	168 Paket	100 %	168 Paket	504 Paket	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	12 Paket	300 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	18 Dokumen	300 %
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	12 Paket	300 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	36 Laporan	300 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	119 Laporan	119 Laporan	119 Laporan	100 %	119 Laporan	357 Laporan	300 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	36 Laporan	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	36 Laporan	300 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	182 Unit	182 Unit	182 Unit	100 %	182 Unit	546 unit	300 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100 %	3 Gedung	9 Gedung	300 %
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	63 Unit	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	66,67%	73,68 %	73,68 %	73,68 %	100 %	73,68 %	221 %	300 %
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	54 OPD	54 OPD	54 OPD	100 %	86 OPD	194 OPD	359 %
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	100 %	57 Dok	171 Dok	300 %
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 PD	36 PD	36 PD	36 PD	100 %	36 PD	108 PD	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 Orang	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	100 %	90 Orang	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	57 Lembaga	57 Lembaga	57 Lembaga	57 Lembaga	100 %	57 Lembaga	171 Lembaga	300 %
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %
	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3 %
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam	65 Orang	14 Mitra kerja/	14 Mitra kerja/	14 Mitra kerja/	100 %	65 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO		Jejaring	Jejaring	Jejaring				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 mitra kerja / jejaring	70 Org	70 Org	70 Org	100 %	14 mitra kerja / jejaring	-	-
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	150 Org	-	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100 %	3 Layanan	9 Layanan	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	43 Orang	43 Org	43 Org	43 Org	100 %	43 Orang	129 Org	300 %
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	100 %	36 Orang	108 Orang	300 %
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman	49,34%	16,45 %	16,45 %	16,45 %	100 %	38,89%	71,79 %	1,45 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa								
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Jumlah kepala desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat desa	72 orang	72 Org	72 Org	72 Org	100 %	72 Orang	216 Org	300 %
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Perangkat	57 Perangkat	57 Perangkat	57 Perangkat	100 %	57 Perangkat	171 Perangkat	300 %
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki data terpilih gender dan anak	93,75%	89,58 %	89,58 %	89,58 %	100 %	91,67%	270 %	2,8 %
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	3 Buku	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %
		Program Pemenuhan Hak Anak	Prosentase kecamatan layak anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %
			Prosentase desa kelurahan layak anak	72,37%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %
		Pelebagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	80 Org	80 Org	80 Org	100 %	136 Orang	296 Org	218 %
		Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27 Organisasi	27 Organisasi	27 Organisasi	27 Organisasi	100 %	27 Organisasi	81 Organisasi	300 %
		Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		memenuhi hak anak kewenangan kab/kota	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	175 orang	175 Org	175 Org	175 Org	100 %	175 Orang	525 Org	300 %
		Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95 orang	95 Org	95 Org	95 Org	100 %	95 Orang	285 Org	300 %
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %
		Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan	41,82%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	300 %	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dengan hukum) yang mendapatkan layanan								
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100 %	60 Orang	180 Orang	300 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat	15 Perangkat	15 Perangkat	15 Perangkat	100 %	15 Perangkat	45 Perangkat	300 %
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	100 %	125 Orang	375 Org	300 %
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100 %	5 Orang	15 Orang	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	100 %	10 Layanan	30 Layanan	300 %
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 Orang	108 Orang	108 Orang	108 Orang	100 %	108 Orang	324 Org	300 %
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 %	100 orang	300 Org	300 %
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	1.169.760 jiwa	1.169.760 jiwa	1.170.748 jiwa	1.170.748 jiwa	100 %	1.169.760 jiwa	3.510.268 Jiwa	300 %
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100 %	38 Unit	114 Unit	300 %
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	300 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,8%	80,8%	80,8%	80,8%	100 %	80,8%	242,40 %	300 %
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK	2 Jenis media KIE	2 Jenis media KIE	2 Jenis media KIE	2 Jenis media KIE	100 %	2 Jenis media KIE	6 Jenis media KIE	300 %
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	1 Organisasi	3 Organisasi	300 %
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	300 %
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	12 Laporan	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (MiniloK)	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	100 %	18 balai penyuluh	54 Balai penyuluh	300 %
	Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	6 Laporan	300 %
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Orang	60 Org	60 Org	60 Org	100 %	60 Orang	180 Org	300 %
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	1 Organisasi	3 Organisasi	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB								
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	9 Unit	300%
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300%
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	1828 Orang	1828 Orang	1828 Orang	1828 Orang	100 %	1828 Orang	5484 Orang	300 %
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan	46 Faskes	46 Faskes	46 Faskes	46 Faskes	100 %	46 Faskes	138 Faskes	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP								
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jaringannya (DAK NON FISIK)	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	6 Laporan	300 %
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD DAN DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2229 Orang	2229 Orang	2229 Orang	2229 Orang	100 %	2229 Orang	6687 Orang	300 %
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	18 Unit	300 %
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pelayanan KB yang Dapat Ditingkatkan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	43 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	100 %	43 Faskes	127 faskes	295 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	100 %
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	100 %	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	5.484 kader PPKBD dan Sub PPKBD	300 %
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	380 %
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	100 %	38 Kampung KB	114 Kampung KB	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	96,96%	96,96%	96,96%	96,96%	100 %	96,96%	291 %	300 %
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1.066 Kelompok	1.066 Kelompok	1.066 Kelompok	1.066 Kelompok	100 %	1.066 Kelompok	3.198 kelompok	300 %
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100 %	3 Kelompok	9 Kelompok	300 %
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100 %	30 Unit	90 Unit	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 %	20 Orang	600 org	300 %
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR,	2586 Orang	2586 Orang	2586 Orang	2586 Orang	100 %	2586 Orang	7758 Orang	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	18 Dokumen	54 Dokumen	300 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bidang Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja (Renstra DP2KBP2 2016-2021)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja yang dicapai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilihat dari bagaimana Organisasi memiliki target tinggi yang ingin dicapai.

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode 2021 – 2026 menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang diratifikasi oleh pemerintah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah :

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Madya	APE Nindya	100 %
	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Madya	KLA Madya	100 %
	Prevalensi KB Aktif	80,80 %	80,80 %	100 %
	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,00 %	72,00%	100 %
	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	100 %	100 %
	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,80 %	80,80 %	100 %
	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	95,49 %	96,96 %	100 %
	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	66,67 %	73,68 %	100 %
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan	100 %	100 %	100 %
	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	100 %	100 %	100 %
	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %
	Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %	100 %	100 %
	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	72,37 %	100 %	100 %

	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	100 %	100 %	100 %
2. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	90 %	90 %	100 %
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	84,67 %	95,93 %	100 %
	Indeks Profesionalitas ASN	86,15	86,15	100 %
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,42 (A)	84,42 (A)	100 %
	Nilai RB Perangkat Daerah	82,62 (A)	82.62 (A)	100 %
3. Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %

Analisis capaian kinerja masing – masing sasaran pada Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN KINERJA 1

Sasaran Kinerja yang pertama Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dengan empat belas indikator yaitu

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE)
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
3. Prevalensi KB Aktif
4. Presentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan
6. Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana
7. Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif
8. Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender
9. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan

10. Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa
11. Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak
12. Persentase Kecamatan Layak Anak
13. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak
14. Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan

Dari Empat Belas indikator tersebut dapat di jabarkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE)

(Predikat Pratama, Madya, Utama, Mentor)

Target APE Madya dengan realisasi nilai APE Nindya yang di dapat dari 7 komponen kunci yaitu :

1. Komitmen, di buktikan dengan SK Fokal Point, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
2. Kebijakan, di buktikan dengan RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
3. Kelembagaan, adanya Unit PPPA Daerah (Tahun 2022 masih proses pembentukan), Kelompok Pokja PUG, Tim driver PUG, Rencana Aksi Daerah
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran, jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih PPRG, Anggaran dan Fasilitas yang memadai.
5. Alat Analisis Gender, Forum data tiap Perangkat Daerah (Satu Data Palapa), Data Statistik yang terpilah, Profil gender.
6. Data Gender, dibuktikan dengan dokumen ARG (penyusunan GAP, GBS, TOR) tiap Perangkat Daerah, adanya modul dan panduan untuk menyusun dokumen ARG, Dokumen ARG 25 % dari anggaran tahun n – 1.
7. Partisipasi Masyarakat, Jejaring sebagai kontrol, pengawas, mitra kerja pelayanan pelaksanaan PUG (Puspa, CSR, LSM, Akademisi) di libatkan dalam pelaksanaan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE).

Perolehan dari Indikator Sasaran Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di dapat dari 4 program, 7 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender di dukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG.
 - b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan di dukung dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan indikator Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dukung dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak dengan di dukung oleh 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.

FOTO PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)



2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

(Predikat Pratama, Madya, Nindya, KLA)

Target KLA Madya dengan realisasi KLA Madya berdasarkan 5 Klaster :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, di buktikan dengan pembuatan akte seluruh anak di Kabupaten Mojokerto (dispenduk capil), Forum anak desa, kecamatan, kabupaten (DP2KBP2), Tersedianya pusat pengaduan (P2TP2A), Pengawasan penggunaan internet bagi anak (pengawasan tim cyber dari polres/kominfo), KIE bagi anak disabilitas (Dinsos), penyediaan KIA (dispenduk capil).
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dibuktikan dengan pengasuhan alternatif (lingkungan keluarga dan yayasan untuk anak terlantar), Pemenuhan tumbuh kembang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Pelatihan pola asuh anak, dukungan akreditasi LKSA (Lembaga Lkesejahteraan Sosial Anak) Villa durian do'a, Pendidikan pra nikah dilakukan Kemenak dan DP2KBP2
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adanya puskesmas ramah anak, ruang laktasi di semua fasilitas umum, fasilitasi sarpras posyandu, teredianya air bersih, ruang terbuka hijau, Perventif AKI dan Anak (Dinas Kesehatan)
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya, di buktikan dengan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan inklusi, Pusat kreatifitas anak, Sarpras ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SK Sekolah Ramah Anak), Beasiswa, Memfasilitasi SKB, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanpa kekerasan
5. Perlindungan Khusus, adanya fasilitasi P2TP2A, program pencegahan tindak kekerasan yang di lakukan oleh DP2KBP2 dan Dinas Sosial, Perlindungan dan mitigasi bencana bagi anak (Dinsos dan BPBD), akses kartu penyandang disabilitas (dari dinsos).

Perolehan dari Indikator Sasaran Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di dapat dari 2 program, 5 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Prosentase Kecamatan Layak Anak dan Prosentase Desa/Kelurahan Layak Anak di dukung dengan 2 kegiatan, 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan

- Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, di dukung 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator Prosentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan di dukung dengan 3 kegiatan, 7 sub kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota, di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

SALAH SATU INDIKATOR KLA

NO	INDIKATOR SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Apakah ada profil anak yang berbasis pada klaster KLA ?	Beberapa data yang harus di dapat dari instansi vertical/LSM misalnya : Data perkawinan anak, data anak berkonflik dengan hukum yang sudah incra dan di lembaga pembinaan anak; data buruh anak	DP2KBP2	
2.	Apakah ada komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dikembangkan oleh pemerintah daerah	Pastikan ada lampiran/foto pendukung untuk setiap media KIE yang di pilih. Jika ada situs (website) atau media social, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN	BAPPEDA, DISKOMINFO, DP2KBP2, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
3.	Berapa kali publikasi terkait KLA yang di lakukan oleh media satu tahun terakhir	Pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan No. 7 pastikan jawaban Media KIE yang di pilih sesuai dengan jawaban Media KIE di pertanyaan No. 7. Pastikan ada lampiran/foto pendukung untuk setiap Media KIE yang di pilih. Jika ada website atau media social, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN	BAPPEDA, DISKOMINFO, DP2KBP2, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4.	Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak	Lengkapi matriks dan lampiran bukti adanya mekanisme pengawasan yang diupayakan oleh penanggung jawab indicator dan mitra kerja (5.5)	DISKOMINFO, DISPERKA, DP2KBP2	
5.	Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak ?	Lengkapi matriks dan lampiran sertifikat SDM atau dokumen yang menjelaskan bahwa SDM atau dokumen yang menjelaskan bahwa SDM sedang mengikuti sertifikasi ramah anak. Pastikan dokumen pendukung sudah di sahkan oleh pihak berwenang (5.6)	DISKOMINFO, DISPERKA, DP2KBP2	
6.	Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak ?	Tuliskan di kolom catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya	DP2KBP2	
7.	Berapa persen kecamatan memiliki forum anak ?	Lampirkan daftar FA kecamatan, dan SK pembentukan FA tiap kecamatan secara lengkap	DP2KBP2, Forum Anak, Kabupaten/Kota, Kecamatan	
8.	Berapa persen Desa/kelurahan memiliki forum anak ?	Lampiran daftar FA desa/kelurahan, dan SK pembentukan di tiap desa/kelurahan secara lengkap	DP2KBP2, Forum Anak, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan	

9.	Apakah forum anak/kelompok anak sudah di libatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Lengkapi matriks, dan lampirkan bersama dokumen pendukung : undangan, notulensi, foto, kegiatan yang mendukung	BAPPEDA, DP2KBP2	
10.	Apakah forum anak/kelompok anak berperan sebagai	Lengkapi matriks, dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung, foto harus di beri keterangan kegiatan	DP2KBP2	
11.	Apakah forum anak/kelompok anak di alihkan konvensi hak anak	Lengkapi matriks dan lampiran modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data forum anak yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar dan notulen, lampirkan juga foto kegiatan	DP2KBP2	

FOTO PENGHARGAAN KLA MADYA



3. PREVALENSI KB AKTIF

Target 80,80% Dengan realisasi 80,23%, Capain 99,29 %

Pencapaian peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember adalah 184.695 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Kemlagi dengan jumlah 14.691 akseptor atau 142,62 % dari PPM, dan terendah Kecamatan Trawas dengan jumlah 4.711 akseptor atau 149,32 % dari PPM. Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 58.076 akseptor dan PA-Pria/MOP sejumlah 361 Akseptor.

Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi Tahun 2023 sebesar 80,23 % dari PUS sejumlah 230.204.

Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Dawarblandong yaitu 83,17 % dan yang terendah Kecamatan Pungging sebesar 77,75 %.

Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 91.777 akseptor dan terendah MOP yaitu 361 akseptor.

Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2023
1	IUD	22.654
2	MOW	12.599
3	MOP	361
4	Kondom	5.526
5	Implant	22.462
6	Suntik	91.777
7	Pil	29.316
	TOTAL	184.695

Sumber data : Bidang Dalduk

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 s/d 2023

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2019	240.593	194.562	80,87
2.	2020	245.061	197.565	80,62
3.	2021	247.373	199.545	80,67
4.	2022	227.174	183.388	80,73
5.	2023	230.204	184.695	80,23

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Rutin)

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Perolehan dari indikator sasaran Prevalensi KB Aktif di dapat dari 2 program, 6 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan indikator Prosentase Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan, di dukung dengan 2 kegiatan, 5 sub

kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 5 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - c. Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga.
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB.
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat Pelayanan Keluarga Berencana di dukung dengan 4 Kegiatan, 15 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal di dukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja.
 - b. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)'
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
 - e. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
 - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di dukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga

Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

- d. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jejaringnya.
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
KABUPATEN MOJOKERTO
BULAN DESEMBER 2023

NO	KECAMATAN	PPM 2023	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JML	%THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV
				IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1.	JATIREJO	4.184	7.373	744	631	1	163	649	3.107	719	6.014	143,74	2.025	33,67	81,57
2.	GONDANG	4.992	9.972	1.677	721	30	12	1.827	2.827	944	8.038	161,02	4.255	52,94	80,61
3.	PACET	6.794	13.217	2.022	661	13	11	2.169	4.539	1.295	10.690	157,34	4.845	45,32	80,88
4.	TRAWAS	3.155	5.921	407	401	3	33	616	2.676	575	4.711	149,32	1.427	30,29	79,56
5.	NGORO	9.295	17.188	1.467	1.094	11	354	1.316	6.667	2.851	13.760	148,04	3.888	28,26	80,06
6.	PUNGGING	8.399	14.966	1.166	400	11	200	872	7.755	1.232	11.636	138,54	2.449	21,05	77,75
7.	KUTOREJO	6.673	11.771	514	349	6	134	971	4.942	2.538	9.454	141,66	1.840	19,46	80,32
8.	MOJOSARI	8.421	16.100	3.120	1.146	15	637	1.731	4.483	1.785	12.923	153,46	6.018	46,57	80,27
9.	DLANGGU	6.581	12.413	1.540	1.095	63	64	1.436	4.706	1.045	9.949	151,18	4.134	41,55	80,15
10.	BANGSAL	5.508	9.786	606	460	11	531	701	4.335	1.230	7.874	142,96	1.778	22,58	80,46
11.	PURI	8.334	15.928	1.279	728	21	794	1.979	5.036	2.904	12.741	152,88	4.007	31,45	79,99
12.	TROWULAN	8.591	15.631	908	775	10	286	1.646	6.310	2.597	12.532	145,87	3.339	26,64	80,17
13.	SOOKO	8.215	15.177	2.017	885	5	470	918	6.493	1.461	12.249	149,11	3.825	31,23	80,71
14.	GEDEG	8.454	16.576	1.913	917	22	605	1.716	5.661	2.371	13.203	156,20	4.568	34,59	79,66
15.	KEMLAGI	6.285	6.285	1.138	884	58	438	1.526	4.792	1.237	10.073	160,27	3.606	35,80	83,04
16.	JETIS	10.301	18.666	933	601	62	554	947	9.300	2.294	14.691	142,62	2.543	17,31	78,70
17.	DAWARBLANDONG	5.232	8.661	338	382	10	113	661	4.540	1.159	7.203	137,67	1.391	19,31	83,17
18.	MOJOANYAR	4.576	8.728	895	469	9	127	775	3.608	1.079	6.952	151,92	2.138	30,75	79,65
	KABUPATEN	123.990	230.204	22.654	12.599	361	5.526	22.462	91.777	29.316	184.695	148,96	58.076	31,44	80,23

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{183.560}{227.174} \times 100 \% = 80,80 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{184.695}{230.204} \times 100 \% = 80,23 \%$$

4. PROSENTASE KELUARGA YANG IKUT KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Target 72% terealisasi 72%

Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten Mojokerto Sebesar 81.353 Keluarga dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No.	Kelompok	Juamalah Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sasaran
1.	BKB	37.036	50.733
2.	BKR	23.999	33.950
3.	BKL	17.085	25.267
4.	PIK - R	2.625	2.625
5.	UPPKA	608	782
JUMLAH		81.353	113.357

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Dallap)

Perolehan dari indikator sasaran Prosentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di dukung dengan 8 Kegiatan, 8 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - c. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - d. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - f. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.
- b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mintra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Organisasi Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - b. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

**PROSENTASE KELUARGA
YANG IKUT KELOMPOK KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SASARAN					REKAP JUMLAH SASARA N	JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN					REKAP JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN	PROSENTASE
		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		
1.	JATIREJO	1.361	1.066	913	125	12	3.477	1.187	600	624	125	0	2.536	73
2.	GONDANG	390	310	280	250	0	1.230	370	290	270	250	0	1.180	96
3.	PACET	3.404	2.184	1.312	100	34	7.034	3.171	1.998	1.295	100	28	6.592	94
4.	TRAWAS	1.705	1.951	1.866	150	40	5.712	1.825	2.075	1.644	150	38	5.732	100
5.	NGORO	6.277	1.026	1.882	125	2	9.312	5.548	2.768	1.244	125	2	9.687	104
6.	PUNGGING	1.280	1.126	2.005	50	29	4.490	1.060	429	1.151	50	18	2.708	60
7.	KITOREJO	3.726	1.522	1.083	125	55	6.511	3.695	1.517	1.066	125	45	6.448	99
8.	MOJOSARI	3.529	1.312	1.409	25	25	6.300	2.850	1.209	1.330	25	0	5.414	86
9.	DLANGGU	3.493	4.471	1.753	100	19	9.836	1.706	1.759	1.265	100	5	4.835	49
10.	BANGSAL	3.655	653	443	100	18	4.869	908	653	423	100	8	2.092	43
11.	PURI	3.242	2.413	1.106	100	16	6.877	3.242	2.413	1.106	100	7	6.868	100
12.	TROWULAN	3.739	3.308	2.250	300	10	9.607	1.365	825	766	300	10	3.266	34
13.	SOOKO	3.047	674	967	125	21	4.834	558	275	425	125	9	1.392	29
14.	GEDEG	3.349	2.673	1.622	125	11	7.780	3.183	2.410	1.151	125	4	6.873	88
15.	KEMLAGI	2.692	2.812	1.274	150	21	6.949	2.692	2.812	1.274	150	21	6.949	100
16.	JETIS	1.156	1.057	1.276	100	19	3.608	734	387	488	100	2	1.711	47
17.	DAWARBLANDONG	3.289	4.768	3.029	400	395	11.881	1.543	955	766	400	388	4.052	34
18.	MOJOANYAR	1.399	624	797	175	55	3.050	1.399	624	797	175	23	3.018	99
	JUMLAH	50.733	33.950	25.267	2.625	782	113.357	37.036	23.999	1.7085	2.625	608	81.353	72

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga}}{\text{Jumlah Sasaran Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{81.353}{113.357} \times 100 \% = 72\%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{81.353}{113.357} \times 100 \% = 72\%$$

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

**(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Mojokerto**

NO	IINDIKATOR	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	APE Madya	APE Utama	APE Utama	APE Mentor	APE Madya	APE Nindya	APE Mentor	-	Di dapat dari 7 komponen kunci : 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Kelembagaan 4. SDM dan Anggaran 5. Alat Analisis Gender 6. Data Gender 7. Partisipasi Masyarakat
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	-	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Utama	KLA Madya	KLA Madya	KLA Utama	-	Berdasarkan 5 Kalster : 1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya 5. Perlindungan Khusus

3.	Prevalensi Peserta KB Aktif	-	-	80,55 %	80,56 %	80,57 %	80,59 %	80,73 %	80,23 %	80,59 %	-	Data di dapat berdasarkan jumlah PUS sebanyak 230.204 dan jumlah peserta KB aktif (yang ikut IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntuk dan Pil) sebanyak 184.695
2.	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	72,95 %	72,96 %	72,97 %	72,99 %	71,11 %	72,11 %	72,99 %	-	Data di dapat berdasarkan jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebanyak 81.353 Kelompok dan Jumlah sasaran 113.357 Kelompok

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Disadari sepenuhnya dalam era otonomi daerah, walaupun tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara umum telah dilaksanakan sepenuhnya namun dalam tahun 2021 hal-hal yang masih memerlukan perhatian secara khusus antara lain :

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terutama petugas lapangan KKBPK (Koordinator dan Penyuluh KKBPK) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya
4. Keberadaan Kampung KB yang relatif masih baru memerlukan perhatian khusus agar keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam memberikan informasi dan edukasi tentang Program KKBPK.
5. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhir ini menjadi tantangan bagi KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.

2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
3. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan program di tingkat desa atau dusun, karena sering terjadinya pergantian petugas PPKBD dan Sub PPKBD dan banyak yang merangkap menjadi kader lain, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan dan pemahaman serta kinerja terhadap program.
4. Belum semua kader BKR dan PIK R memahami tentang program Genre terutama triad KRR (pernikahan dini, seks pra nikah, napza) sehingga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja.
5. Pemahaman keluarga tentang pendidikan balita serta kesejahteraan dan kesehatan lansia masih kurang sehingga kegiatan BKB dan BKL kurang optimal.
6. Jumlah petugas lapangan KB sangat kurang untuk mendukung operasional pelaksanaan program di lapangan, sehingga sangat mempengaruhi hasil capaian kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih menjadi satu dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2)
2. Shelter atau titipan sementara belum berfungsi secara optimal
3. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan
4. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian yang ada
5. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal.
6. Masih kurangnya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada mitra kerja.

7. Belum adanya data terpilah tentang gender.

Sedangkan Isu – Isu strategis strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi.
5. Bertambahnya usia perkawinan ideal.
6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL).
8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.
10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DP2KBP2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 (A)	5.771.800.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DP2KBP2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 (A)	5.771.800.000	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	12.700.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	12.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	5.302.748.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	5.302.748.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	65,57%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	65,57%	-	

	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	176.729.600	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	176.729.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	139.622.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	139.622.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	140.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	140.000.000	
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	85,71%	53.200.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	85,71%	255.500.000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	24.900.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	24.900.000	
	Pembedayaan Perempuan dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	40 Orang	23.800.000	Pembedayaan Perempuan dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	40 Orang	88.300.000	

	Kabupaten/Kota										
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	142.200.000	
3	Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	76.800.000	Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	456.800.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	6.040.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	456.800.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 Mitra Kerja / Jejaring	58.800.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 Mitra Kerja / Jejaring	108.800.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	DP2KBP2	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah	43 Orang	11.960.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	DP2KBP2	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah	43 Orang	251.960.000	

	Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan			Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan			
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP2KBP2	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	97,92%	26.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP2KBP2	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	97,92%	40.980.000	
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	26.000.000	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	40.980.000	
5	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase kecamatan layak anak	50%	29.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase kecamatan layak anak	50%	50.932.500	
			Prosentase desa kelurahan layak anak	14,47%				Prosentase desa kelurahan layak anak	14,47%		
	Pelebagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	11.000.000	Pelebagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	32.932.500	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	DP2KBP2	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam	175 orang	18.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	DP2KBP2	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam	175 orang	18.000.000	

	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto			Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		pemenuhan hak anak di kabupaten Mojokerto			
6	Program Perlindungan Khusus Anak	DP2KBP2	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	100%	95.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	100%	199.000.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 orang	8.500.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 orang	8.500.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	18.500.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	18.500.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	68.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	84.000.000	

	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
7	Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP2	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	1.462.400.000	Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP2	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	1.462.400.000	
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP2KBP2	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	30.000.000	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP2KBP2	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	30.000.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	1.432.400.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	1.432.400.000	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP2	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,58%	6.779.868.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP2	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,58%	7.452.610.800	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi	50 media komunikasi	1.662.800.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi	50 media komunikasi	1.662.800.000	

	Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		program KKBPK			Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		program KKBPK			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Org	2.952.168.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Org	3.461.568.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alkon	1.562.150.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alkon	1.725.492.800	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	602.750.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	602.750.000	
9	Program Pemberdayaa	DP2KBP2	Prosentase Kelompok	97,91%	5.860.600.000	Program Pemberdayaan	DP2KBP2	Prosentase Kelompok	97,91%	5.860.600.000	

	n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif			dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif			
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	430.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	430.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	5.430.600.000	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	5.430.600.000	
	JUMLAH				20.154.668.000					21.470.523.700	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 2 (dua) pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah dan masyarakat. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2025
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana		
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah media komunikasi program KKBPK		
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP2KBP2	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Melakukan Sosialisasi KB

	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK		
	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	
2.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif		
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan		
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kader	Melakukan Edukasi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	DP2KBP2	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Bangga Kencana (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	REMBUK STUNTING
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa		
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak		Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa		

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Pembinaan (Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan) Tentang Hak Perempuan dan Anak
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	SEKOPER (Sekolah Perempuan dan Sekolah Ayah)
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Pelatihan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital
4.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender		
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwiraswasta		
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP2KBP2	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Organisasi	Musrenbang Perempuan Tingkat Pedesaan

			Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Pelaksanaan DR PPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak)
5.	Program Perlindungan Khusus Anak		Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan		
	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DP2KBP2	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak dan Sosialisasi Dispensasi Nikah

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 ada usulan program dan kegiatan Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Profinsi

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan makmur. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tujuan pembangunan program KB Nasional di masa mendatang adalah meningkatkan kualitas program KB untuk memenuhi hak – hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran agar terwujudnya keluarga berkualitas.

Dalam Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang menitik beratkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan dimana penduduk bukan hanya sebagai obyek pembangunan tapi juga sebagai subyek sekaligus sebagai menikmati pembangunan, maka dalam hal ini :

1. Kualitas penduduk harus dikendalikan
2. Kualitas penduduk harus ditingkatkan
3. Mobilitas penduduk harus diarahkan dan
4. Data penduduk harus tersedia by name by adres

Dalam RPJMD 2015 – 2019 Pemerintah telah menerapkan 9 prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawacita dan yang berkaitan dengan program KB adalah **Nawacita ke – 3** “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka NKRI”, **Nawacita ke – 5** “ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia “, Nawacita ke – 8 “Melakukan revolusi karakter bangsa”.

Sebagai implementasi dari Nawacita tersebut ada Rencana Strategis 2016 - 2021 dan sasaran strategis yang harus di capai dan dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
2. Menurunnya angka TFR
3. Meningkatkan capaian peserta KB Aktif
4. Menurunkan kebutuhan KB yang tidak terlayani
5. Menurunnya angka kelahiran pada usia remaja kelompok umur 15 – 19 tahun
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (15 – 45 Tahun)

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB secara merata di semua tingkat wilayah.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

a. Tujuan

Maksud dengan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, sehingga para pelaksana pembangunan daerah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan tujuan agar :

- Keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 adalah :

- Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program dan Kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Kegiatan:
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari kegiatan :
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari kegiatan :
- Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari kegiatan :
- Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemenuhan Hak Anak terdiri dari kegiatan :
- Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari kegiatan :
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Pengendalian Peduduk terdiri dari kegiatan :
- Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya local
 - Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB
- i. Program Pembedayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (RANGAN RENJA 2025)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DP2KBP2	84,42 (A)	5.771.800.000			85,78 (A)	6.320.587.175
2	14	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	DP2KBP2	90%	12.700.000			2 Dokumen	12.700.000
2	14	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP2KBP2	2 Dokumen	7.500.000	DAU		2 dokumen	7.500.000
						Rincian :								
						1. Rapat Evaluasi Kinerja dan rapat realisasi anggaran								

2	14	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP2KBP2	144 Laporan	70.000.000	DAU		144 Laporan	95.188.000
						Rincian :								
						Perjalanan dinas luar dan dalam daerah								
2	14	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	DP2KBP2	90%	139.622.400			2 Keg	219.000.000
2	14	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP2KBP2	12 Laporan	75.000.000	DAU		12 bulan	75.000.000
						Rincian :								
						Bayar listrik dan telpon								
2	14	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	12 Laporan	64.622.400	DAU		12 Laporan	144.000.000
						Rincian :								
						Honor Tenaga Harian Lepas (THL)								
2	14	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	DP2KBP2	90%	140.000.000			176 Unit sepeda, 7 mobil	218.210.250
2	14	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DP2KBP2	176 Unit sepeda, 7 mobil	105.000.000	DAU		176 Unit sepeda, 7 mobil	143.210.250

2	08	02	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	24.900.000	DAU		1 Dokumen	95.000.000
						Rincian :								-
						1. Bimtek Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa 2. Bimtek PPRG Perangkat Daerah 3. Desk ARG untuk Perangkat Daerah								
2	08	02	2	02		Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwiraswasta	DP2KBP2	3 Dokumen	28.300.000			3 Dokumen	175.000.000
2	08	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwiraswasta	DP2KBP2	3 Dokumen	28.300.000	DAU		3 Dokumen	175.000.000
						Rincian :								

						1. Pelatihan Wirausaha 2. Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik 3. Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Hukum								
2	08	02	2	03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	DP2KBP2	90 orang	-			90 Orang	200.000.000
2	08	02	2	03	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	DP2KBP2	3 Lembaga	-	DAU		3 Lembaga	200.000.000
						Rincian :								
						1. Kegiatan PKK (Pencegahan Perkawinan Anak dan FGD Pembahasan Draft Buku PAARED)								
2	08	03				Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	DP2KBP2	100,00%	76.800.000			100%	950.000.000

2	08	03	2	01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	DP2KBP2	65 orang	6.040.000			65 Orang	200.000.000
2	08	03	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	6.040.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000
						Rincian :								
						Pokja Perempuan dan Pokja Masyarakat PUSPA MAJAPAHIT (Sekolah Perempuan, Sekolah Ayah, Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa)								
2	08	03	2	02		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	DP2KBP2	15 mitra kerja / jejaring	58.800.000			14 mitra kerja / jejaring	150.000.000
2	08	03	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	DP2KBP2	8 Orang	58.800.000	DAU		8 Orang	150.000.000
						Rincian :								

2	08	06	2	01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP2KBP2	27 Organisasi	6.000.000	DAU		27 Organisasi	30.000.000
						Rincian :								
						Biaya operasional pembinaan forum anak (Forum Anak Majapahit)								
2	08	06	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
						Rincian :								
						Persiapan dan Pelaksanaan Evaluasi KLA Tingkat nasional								
2	08	06	2	02		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	DP2KBP2	125 Orang	18.000.000			125 Orang	20.000.000

2	08	06	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	95 Anak	9.000.000	DAU		95 Anak	10.000.000
						Rincian :								
						Diperuntukkan Untuk Kegiatan Pelatihan KHA Bagi OPD dan Pelayanan Masyarakat								
2	08	06	2	02	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	9.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
						Rincian :								
						Diperuntukkan Untuk Kegiatan Pelatihan KHA Bagi Camat dan Kepala Desa								
2	08	07				Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	DP2KBP2	42,86%	95.000.000			42,86%	118.500.000
2	08	07	2	01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	DP2KBP2	30 orang	8.500.000			30 orang	118.500.000

2	08	07	2	02	04	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DP2KBP2	15 Orang	8.500.000	DAU		15 Orang	50.000.000
						Rincian :								
						Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak bagi petugas KUA								
2	08	07	2	02		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	DP2KBP2	125 Orang	18.500.000			125 Orang	18.500.000
2	08	07	2	02	05	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	DP2KBP2	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
						Rincian :								
						Penanganan Kasus								
2	08	07	2	02	06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	DP2KBP2	10 Orang	8.500.000	DAU		10 Orang	50.000.000

2	14	02				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	DP2KBP2	100%	1.462.400.000			100%	1.587.400.000
2	14	02	2	01		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	DP2KBP2	100 orang	30.000.000			100 orang	
2	14	02	2	01		Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
						Rincian :								
						Penyusunan Dokumen GDPK (Jasa Konsultan), Rapat Koordinasi Lintas Sektor, Perjalanan Dinas, ATK, Bahan Cetak								
2	14	02	2	01	19	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	DP2KBP2	1 Kegiatan	10.000.000	DAU		1 Kegiatan	25.000.000
						Rincian :								

					2. Operasional Pengolahan Data (DAK NON FISIK)			19 Dokumen	90.000.000	DAK				
					3. Dukungan SIGA (sewa langganan internet broadband)			18 Dokumen	1.080.000.000	DAK				
2	14	02	2	02	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana0 di Sektor Lain	DP2KBP2	18 Unit	10.000.000	DAU		54 Unit	100.000.000	
					Rincian :									
					Orientasi Kader Rumah Data Kependudukan, Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Dataku di Kampung KB, Perjalanan Dinas,									
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	DP2KBP2	80,58%	6.779.868.000			80,59%	5.487.435.800	
2	14	03	2	01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK	DP2KBP2	144 orang	1.662.800.000			50 media komunikasi	1.939.485.600	

2	14	03	2	01	02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	DP2KBP2	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	286.685.600
						Rincian :							
						KIE Program KB dan Kespro							
2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	DP2KBP2	1 Laporan	140.000.000	DAK	1 Laporan	140.000.000
						Rincian :							
						1. Audit kasus Stunting			1 Laporan	80.000.000			
						2. Dukungan Manajemen			1 Laporan	60.000.000			
2	14	03	2	01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	DP2KBP2	54 Laporan	892.800.000	DAK	54 Laporan	892.800.000
						Rincian :							
						1. Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan			18 Laporan	450.000.000			
						2. Langganan Daya dan Jasa			18 Laporan	54.000.000			
						3. Keamanan dan Pramusaji			18 Laporan	388.800.000			

2	14	03	2	01	11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP2KBP2	18 Kecamatan	270.000.000	DAK		18 Kecamatan	270.000.000
						Rincian :								
						Mini lokakarya Kecamatan								
2	14	03	2	01	12	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP2KBP2	2 Dokumen	110.000.000	DAK		1 Dokumen	100.000.000
						Rincian :								
						1. Dukungan Media KIE				100.000.000	DAK			
						2. Promosi Melalui Gerak Mupen				10.000.000	DAU			
2	14	03	2	01	14	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP2KBP2	1 Organisasi	250.000.000	DAK		1 Organisasi	250.000.000
						Rincian :								
						Koordinasi TPPS di tingkat Kab/Kota								
2	14	03	2	02		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	DP2KBP2	60 Orang	2.952.168.000			60 Orang	3.502.950.200

2	14	03	2	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB (APBD dan DAK Non Fisik)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DP2KBP2	2 Organisasi	778.200.000	DAU	2 Organisasi	1.328.982.200
						Rincian :							
						1. Honorarium Rutin PPKBD dan Sub PPKBD selama 6 bulan				778.200.000			
2	14	03	2	02	04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP2KBP2	304 Orang	912.000.000	DAK	304 Orang	912.000.000
						Rincian :							
						Operasional Pelaksanaan KIE							
2	14	03	2	02	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (DAK FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DP2KBP2	1 Laporan	1.261.968.000	DAK FISIK	1 Laporan	1.261.968.000
						Rincian :							
						Pembangunan Gedung Alkon							

2	14	03	2	03		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	DP2KBP2	26.929 alokon	1.562.150.000			26.929 alokon	1.562.150.000
2	14	03	2	03	01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK BIDANG KB)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Saran Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP2KBP2	2 Laporan	45.000.000	DAK		2 Laporan	45.000.000
						Rincian :								
						Operasional Distribusi Alokon								
2	14	03	2	03	08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK BIDANG KB)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP2KBP2	2 Laporan	22.500.000	DAK		2 Laporan	22.500.000
						Rincian :								
						Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes								

2	14	03	2	03	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD Dan DAK Non Fisik)	Jumlah orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP2KBP2	3555 Orang	1.494.650.000			3555 orang	1.494.650.000
						Rincian :								
						1. Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan Peningkatan KB MKJP (Non PNS) (APBD)			19 Orang	228.000.000	DAU			
						2. Penggerakan pelayanan KB MKJP (IUD, Implant, MOP, MOW, Cabut Implan)			3.518 Orang	1.266.650.000	DAK			
2	14	03	2	04		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	DP2KBP2	26.929 alokon	602.750.000			1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	602.750.000
2	14	03	2	04	02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DP2KBP2	1 Dokumen	3.750.000	DAK		1 Dokumen	3.750.000
						Rincian :								
						Operasional Penguatan Kampung KB di tingkat kab/kota								

2	14	03	2	04	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	DP2KBP2	86 Kampung	599.000.000	DAK		86 Kampung	599.000.000
						Rincian :								
						1. Pembekalan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas			10 Kampung KB	10.000.000				
						2. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berkualitas			38 Kampung KB	114.000.000				
						3. Operasional Ketahanan Keluarga kelompok kegiatan			38 Kampung KB	475.000.000				
2	14	04				Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	DP2KBP2	97,91%	5.860.600.000			97,97%	6.078.600.000
2	14	04	2	02		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	DP2KBP2	1.066 Kelompok	5.860.600.000			1066 Kelompok	6.078.600.000
2	14	04	2	01	01	Sub Kegiatan Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	DP2KBP2	5 Laporan/Dokumen	48.000.000	DAK		7 Dokumen	48.000.000
						Rincian :								
						Operasional Kegiatan Konseling PPKS di Balai Penyuluhan								

2	14	04	2	01	18	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	25 Laporan	300.000.000	DAK		25 Laporan	300.000.000
						Rincian :								
2	14	04	2	01	05	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	DP2KBP2	2.586 Laporan	2.586.000.000	DAK		2.586 Laporan	2.586.000.000
						Rincian :								
						Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting								
2	14	04	2	01	06	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	862 Laporan	2.844.600.000	DAK		862 Laporan	2.844.600.000
						Rincian :								
						Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
						BKB Kit Stunting								

2	14	04	2	01	19	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DP2KBP2	25 Laporan	82.000.000	DAU		25 Laporan	300.000.000
						Rincian :								
						Pembinaan kader BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA, Insan Genre, Lomba Duta Genre dan Pemberian ATTG untuk UPPKA								
						JUMLAH TOTAL				20.154.668.000				21.138.522.975

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2025 sesuai dengan aplikasi SIMREDA Kabupaten Mojokerto (usulan prioritas dan cadangan) dengan pagu sementara yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp. 20.154.668.000,00** (Dua puluh milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025
Dengan Pagu Sementara Sebagaimana Pada Aplikasi SIPD
Kabupaten Mojokerto

KODE SKPD						2.08.01											
NAMA SKPD						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN																	
KODE						U P	B/ L	INDIKATOR KINERJA			LOKAS I	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
								OUTPUT	OUTCOM E	TARGET			SKPD Terk ait	Pagu (Rp)	K L	Rp.	D/TB/D AK
1						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	1						ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			84,42 (A)	5.771.800.000				-	
2	14	1	2	1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90%	12.700.000				-	
2	14	1	2	1	1			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	7.500.000					
								Rincian :									
								1. Rapat Evaluasi Kinerja dan rapat realisasi anggaran									
								2. Penggandaan dan penjilidan dokumen RENSTRA, RENJA, SPPD									
2	14	1	2	1	7			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	5.200.000					
								Rincian :									

2	14	2	2	2	13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (APBD dan DAK Non Fisik)		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		38 Dokumen		1.180.000.000					
						Rincian :											
						1.Rapat Evaluasi Pengolahan Data dan SIGA, Bahan Cetak, ATK, Perjalanan Dinas, Makan dan Minum Rapat (APBD)				1 Dokumen		10.000.000					
						2. Operasional Pengolahan Data (DAK NON FISIK)				19 Dokumen		90.000.000					
						3. Dukungan SIGA (sewa langganan internet broadband)				18 Dokumen		1.080.000.000					
2	14	2	2	2	14	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Sektor Lain		18 Unit		10.000.000					
						Rincian :											
						Orientasi Kader Rumah Data Kependudukan, Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Data di Kampung KB, Perjalanan Dinas,											
2	14	3				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana		80,58%		6.779.868.000					

2	14	3	2	1		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah media komunikasi program Bangsa Kencana		2 Media	1.662.800.000						
2	14	3	2	1	2	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik)		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1 Dokumen	-						
						Rincian :											
						KIE Program KB dan Kespro											
2	14	3	2	1	8	Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		1 Laporan	140.000.000						
						Rincian :											
						1. Audit kasus Stunting				1 Laporan	80.000.000						
						2. Dukungan Manajemen				1 Laporan	60.000.000						
2	14	3	2	1	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (DAK NON FISIK)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		54 Laporan	892.800.000						
						Rincian :											
						1. Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan				18 Laporan	450.000.000						

							2. Langgan Daya dan Jasa					18 Laporan		54.000.000					-	
							3. Keamanan dan Pramusaji					18 Laporan		388.800.000						
2	14	3	2	1	11		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		18 Kecamatan		270.000.000					-	
							Rincian :													
							Mini lokakarya Kecamatan													
2	14	3	2	1	12		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		2 Dokumen		110.000.000						
							Rincian :													
							1. Dukungan Media KIE							100.000.000						
							2. Promosi Melalui Gerak Mupen							10.000.000						
2	14	3	2	1	14		Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		1 Organisasi		250.000.000						
							Rincian :													

							Rincian :														
							BKB Kit Stunting														
2	14	4	2	1	19		Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		25 Laporan		82.000.000							
							Rincian :														
							Pembinaan kader BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA, Insan Genre, Lomba Duta Genre dan Pemberian ATTG untuk UPPKA														
2	14	4	2	2			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Keluarga Beresiko Stunting yang Terdampingi		11.000 Orang		5.430.600.000							

2	14	4	2	1	5	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		2.586 Laporan		2.586.000.000					
						Rincian :											
						Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting											
2	14	4	2	1	6	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		862 Laporan		2.844.600.000					
						Rincian :											
						Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
2	8	2				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender		85,71%		53.200.000					

2	8	2	2	1		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender		57 Perangkat Daerah		24.900.000					
2	8	2	2	1	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		24.900.000					
						Rincian :											
						1. Bimtek Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa											
						2. Bimtek PPRG Perangkat Daerah											
						3. Desk ARG untuk Perangkat Daerah											
2	8	2	2	2		Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwirausaha		1 Dokumen		28.300.000					
2	8	2	2	2	1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwirausaha		3 Dokumen		28.300.000					
						Rincian :											

2	8	3	2	1	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.040.000									
						Rincian :												-
						Pokja Perempuan dan Pokja Masyarakat PUSPA MAJAPAHIT (Sekolah Perempuan, Sekolah Ayah, Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa)												
2	8	3	2	2		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A/UPTD	15 mitra kerja / jejaring	58.800.000									
2	8	3	2	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	8 Orang	58.800.000									
						Rincian :												
						1. Operasional P2TP2A/UPTD PPA												

2	8	5				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak		97,92%		26.000.000					
2	8	5	2	1		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun		1 buku		26.000.000					
2	8	5	2	1	1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen		26.000.000					
						Rincian :												
						Pelaksanaan Pembuatan Buku Data Gender dan anak												
2	8	6				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Prosentase kecamatan layak anak		50,00%		29.000.000					
									Prosentase desa kelurahan layak anak		14,47%							
2	8	6	2	1		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA		18 Kecamatan		11.000.000					

2	8	6	2	1	1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		27 Organisasi		6.000.000					
						Rincian :											
						Biaya operasional pembinaan forum anak (Forum Anak Majapahit)											
2	8	6	2	1	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		5.000.000					
						Rincian :											
						Persiapan dan Pelaksanaan Evaluasi KLA Tingkat nasional											
2	8	6	2	2		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto		50 Orang		18.000.000					-

2	8	6	2	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		95 Anak		9.000.000					
						Rincian :											
						Diperuntukkan Untuk Kegiatan Pelatihan KHA Bagi OPD dan Pelayanan Masyarakat											-
2	8	6	2	2	3	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		9.000.000					
						Rincian :											
						Diperuntukkan Untuk Kegiatan Pelatihan KHA Bagi Camat dan Kepala Desa											-
2	8	7				Program Perlindungan Khusus Anak		Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan		42,86%		95.000.000					
2	8	7	2	1		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak		25 orang		27.000.000					

2	8	7	2	1	1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang		8.500.000					
						Rincian :											
						Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di sekolah dan Pondok Pesantren				125 Orang		18.500.000					
2	8	7	2	2		Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan		10 orang		18.500.000					
2	8	7	2	2	5	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkatn Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		1 Dokumen		10.000.000					
						Rincian :											
						Penanganan Kasus											
2	8	7	2	2	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		10 Orang		8.500.000					
						Rincian :											

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran / pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan kedalam rencana kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2021 - 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi public atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandate kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

1.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di atas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, Maret 2024

KEPALA DP2KBP2 KAB.MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP.,MM
Pembina
NIP. 19681010 198903 1 008